BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah D.I Yogyakarta sadar bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan di wilayah D.I Yogyakarta, mengingat bahwa D.I Yogyakarta bukanlah suatu provinsi yang kaya akan hasil migas. Pariwisata merupakan sektor penting dalam peningkatan pendapatan nasional maupun daerah. Pariwisata dapat menjadi sektor utama dalam meningkatan sektor-sektor lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti sektor ekonomi, budaya maupun sosial[1].

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam salah satu daerah yang unik di Indonesia, karena masih termasuk kedalam daerah yang menjaga kelestarian budayanya. Sehingga keunikan tersebut dapat menarik jumlah pengunjung yang masuk kedalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivitas para tamu asing baik pejabat negara, komunitas asing, maupun wisatawan domestik atau mancanegara termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dalam catatan pemerintah Provinsi DIY, yakni dalam buku tamu resmi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, rata-rata tamu asing, mulai dari kepala negara, presiden, perdana menteri, duta besar,

[1] Yeti Yudiyanti, *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta dalam membangun Pariwisata berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta, 2014)

utusan konsulat, LSM asing, *foundations*, jurnalis, dan *tour leaders* asing yang berkunjung ke Gubernur DIY rata-rata 63 delegasi per tahun.[2]

Daerah Istimewa Yogyakarta secara administratif terdiri dari satu kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dam 438 kelurahan/desa. Letaknya pun bisa dibilang stategis, terletak di tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada $7^{o}33'$-$8^{o}12'$ lintang selatan dan $110^{o}00'$-$110^{o}50'$ bujur timur, dengan luas wilayah 3.185,80 km^2.

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk kedalam Provinsi yang tidak terlalu luas, namun potensi pariwisata yang ada dikawasan D.I Yogyakarta yang bisa dikatakan lengkap.Kawasan D.I Yogyakarta mempunyai beberapa wisata unggulan baik wisata di bidang kebudayaan dan wisata alam yang bisa menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Luas wilayah yang tidak terlalu luas tersebut menjadi keuntungan bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan dengan luas wilayah tersebut jarak antara satu tempat wisata satu dengan wisata lainya lebih terjangkau dan lebih memudahkan akses bagi wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata yang diinginkan.

Diharapkan dengan dikembangkanya sektor pariwisata di wilayah D.I Yogyakarta dapat membantu perkembangnya ekonomi dan pendapatan daerah. Pembangunan sektor pariwisata mempunyai keterkaitan yang erat dengan berbagai ekonomi masyarakat disekitar objek pariwisata. Kawasan objek

[2]Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Indonesia*(Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), hlm. 244.

pariwisata akan menyerap banyak tenaga kerja.Penduduk setempat akan disibukan dengan berbagai kegiatan ekonomi seperti berdagang produk seni dan kerajinan, penyediaan akomodasi, penyediaan transportrasi dan masih banyak kegiatan perekonomianlain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pariwisata mempunyai keterkaitan yang erat dengan ekonomi dan investasi, oleh sebab itu promosi pariwisata sangat diperlukan untuk menunjang kemajuan pariwisata. Disisi lain pembangunan pariwisata juga mempunyai tujuan untuk dapat mengenalkan keindahan alam yang dimiliki oleh suatu daerah dan memperkenalkan suatu budaya lokal kepada wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

D.I Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang memiliki banyak daya tarik didalamnya, provinsi yang mempunyai banyak predikat ini masih erat mempertahankan nilai-nilai dan tradisi budaya jawa baik itu pemerintah maupun masyakatnya. Nama Daerah Istimewa pun melekat kepadaYogyakarta, dikarenakan keunikanya yang masih terus memegang teguh sistem pemerintahan kerajaan yang mana membuat Sultan Yogyakarta secara otomatis akan menjadi Gubernur D.I Yogyakarta.

Keunikan tersebut tentunya akan menjadi modal yang sangat berharga bagi D.I Yogyakartauntuk membangun sektor pariwisatanya. Disamping itu, D.I Yogyakarta mempunyai bentang alam yang indah memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik itu dataran tinggi (pegunungan) maupun dataran rendah (pantai, dll). Dengan sumber daya alam dan budaya yang mempunyai

keunikan tersendiri, D.I Yogyakarta tentunya mempunyai potensi pariwisata yang tinggi.

Belum lagi citra D.I yogyakarta sebagai kota pelajar yang telah melekat sejak lama menjadi nilai plus D.I Yogyakarta untuk mengembangkan sayap dibidang pariwisata. Hal tersebut tidak luput dari peran cendekiawan-cendekiawan yang berada diwilayah D.I Yoyakarta yang turut membantu proses pengembangan dan pembangunan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata yang didudukung oleh kreativitas seni.

Strategi promosi yang tepat, manajemen pariwisata dan upaya menjalin hubungan luar negeri dengan daerah dibelahan bumi adalah sebuah langkah yang dapat menjadikan sektor pariwisata D.I Yogyakarta menjadi berkembang pesat. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di D.I Yogyakarta diharapkan akan menimbulkan efek ganda untuk perkembangan di sektor ekonomi dan pembangunan daerah seiring dengan kedatangan wisatawan-wisatawan domestik ataupun mancanegara. Selain dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, bukan tidak mungkin pariwisata juga dapat menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya bila kita melihat dari besarnya potensi pariwisata baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola di wilayah D.I Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah " Apa strategi yang diambil oleh Pemerintah D.I Yogyakarta untuk mempromosikan Pariwisata daerah ke luar negeri 2009-2014?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa rumusan masalah yang ada dan membuktikan hipotesa yang ada, penulis mengunakan beberapa konsep sebagai acuan:

1. Konsep Paradiplomasi

Hubungan internasional merupakan suatu studi yang memiliki cakupan bidang yang luas, tentunya hal tersebut menuntut setiap orang yang mempelajari hubungan internasional memiliki pengetahuan yang luas untuk bisa memahami suatu masalah yang berhubungan dengan hubungan internasional.

Salah satu hal yang banyak dipelajari dan merupakan salah satu hal yang mendasar dalam hubungan internasional adalah diplomasi, karena diplomasi merupakan hal erat kaitanya dengan hubungan antarnegara. Perkembangan diplomasipun kian pesat setiap tahunya, perkembangan yang dinamis itupun memunculkan berbagai cara dan aktor baru dalam diplomasi. Salah satunya adalah paradiplomasi.

Pradiplomasiadalah istilah yang mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh intensitas sub-state, dalam rangka kepentingan suatu wilayah daerah secara spesifik[3].

Upaya diplomasi tersebut bukan seperti diplomasi seperti biasanya yang dilakukan oleh negara dengan negara, namun diplomasi disini berarti diplomasi dari daerah ke daerah lain diluar negeri atau bahkan diplomasi dari daerah ke negara lain. Dengan mengunakan konsep paradiplomasi, karena sejak era otonomi daerah di Indonesia, setiap daerah punya wewenang sendiri untuk mengatur dan mengupayakan daerahnya untuk maju secara mandiri.

Hubungan luar negeri antar daerah berbeda negara juga sudah diatur dalam sebuah undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Pasal 88 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut Daerah dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/ badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah[4].

Paradiplomasi masih merupakan konsep baru dalam hubungan internasional. Paradiplomasi pertama kali disebutkan oleh ilmuan asal Basque pada tahun 1980-an dalam perdebatan akademik, ilmuan itu bernama Panayotis Soldatos. Istilah tersebut merujuk pada penggabungan kata *" parallel diplomacy"* menjadi kata

---

[3]Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Indonesia*(Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), hlm. 37.
[4]Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional* (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2001), hlm. 42

"*paradiplomacy*" yang mengacu pada makna *" the foreign policy of non-central government"*, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer[5].

Dalam konsep paradiplomasi ini telah muncul aktor baru dalam hubungan internasional yaitu aktor sub-Negara, yang dimaksud aktor sub-Negara disini adalah pemerintah lokal ataupun pemerintah daerah di suatu negara yang pada era diplomasi tradisional yang berperan menjadi aktor dalam negeri dan yang bertugas sebagai otoritas pemerintah regional, namun pada era transnasional pemerintah pemerintah lokal ataupun pemerintah daerah juga melakukan interaksi yang juga melintasi batas-batas negara mereka, dan dalam taraf tertentu, mereka juga menyusun kebijakan kerjasama luar negerinya yang dalam banyak kasus, tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat[6].

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya otonomi daerah yang sudah dilakukan di indonesia. Fenomena pemerintah daerah membangun suatu hubungan internasional ini sangat tampak di negara-negara industri maju di Barat, seperti di Flander-Belgia, Catalonia-Spanyol, the Basque country, Quebec-Canada[7].

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah sejak lama melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya internasional. Upaya Pemerintah D.I Yogyakarta dalam kerjasama luar negeri dengan pemerintah ataupun pihak swasta luar negeri antara lain sebagai berikut:

---

[5]Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Indonesia*(Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), hlm. 38.
[6]Ibid, hlm.38
[7]Ibid, hlm.38

a. Kerjasama D.I Yogyakarta dengan Provinsi-Provinsi di wilayah Korea Selatan

b. Kerjasama dengan pemerintah Kyoto Perfecture pada 16 Juli 1985 kemudian dilanjutkan perpanjangan kerjasama pada 20 oktober 2010

2. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi kebudayaan adalah salah satu dari sekian banyak macam diplomasi yang dikenal dalam hubungan internasional. Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional dikalangan masyarakat internasional.[8]

Sedangkan arti dari kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat atau menurut istilah antropologi keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamanya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.[9]

Diplomasi budaya adalah diplomasi melalui pelbagai hasil seni budaya.[10]Konsep diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan,olahraga dan kesenian atau secara makro sesuai dengan ciri khas yang utama, misalnya

---

[8]K.J. Holsti, internasional politics, *A framework for analysisThird Edition*, (New Delhi: Prentice Hlml of India,1984) hal 82-83 dalam Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. 2007. *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansinya Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, hal 2
[9]*Kebudayaan*, (http://www.kbbi.kata.web.id/kebudayaan , diakses 21 Juli 2017)
[10]*Diplomasi Budaya*, (http://www.kamusbesar.com/diplomasi-budaya, diakses 20 Juli 2017)

propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer.[11]

Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan

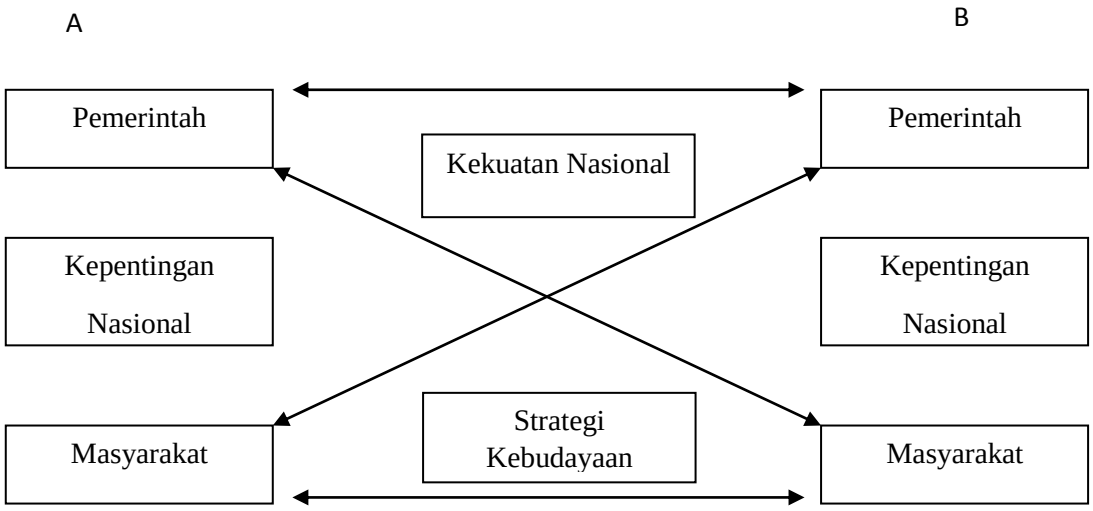

Gambar 1.1

Sumber: Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. 2007. *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansinya Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, hal 17

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh siapapun. Jika dilihat dari pelakunya diplomasi kebudayaan berbeda dengan diplomasi yang lain, hal tersebut dikarenakan baik itu dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah dapat melakukan diplomasi kebudayaan. Sasaran utamanya adalah masyarakat disuatu wilayah negara-bangsa, bukan hanya terpaku pada pemerintahanya saja.

Pelaku diplomasi kebudayaan yang bukan hanya dari kalangan pemerintah tetapi juga kalangan non-pemerintah tersebut mengakibatkan pola dan

[11]*Warsito dan Kartikasari*, Op.Cit., hal 4

karakteristik diplomasi kebudayaan bertumpu pada ciri-ciri pola komunikasi dan bukan pada bidang operasi atau bidang-bidang disiplin yang terlibat.

Skema diatas juga menjelaskan bahwa dibalik diplomasi kebudayaan terdapat kepentinga nasional yang dibawanya. Kepentingan nasional dalam hal ini yang dimaksut oleh penulis adalah kepentingan daerah yang diwakili oleh pemda untuk merepresentasikan negara dalam situasi dan dalam batasan tertentu. Seperti yang telah diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa kewenangan melakukan hubungan internasional atau pihak asing adalah masuk dalam kategori kewenangan tidak wajib bagi daerah.[12]

Kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintah D. I Yogyakarta adalah meningkatkan pendapatan dan juga pembangunan daerah melalui sektor pariwisata. Untuk itu pemerintah D.I Yogyakarta haruslah mempunyai sebuah strategi untuk mencapai kepentinganya. Strategi adalah ilmu ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai.[13] Strategi yang diambil oleh pemerintah D.I Yogyakarta untuk memajukan sektor pariwisatanya adalah strategi promosi pariwisata yogyakarta ke luar negeri. Strategi yang baik dan tepat guna diharapkan dapat menjadi solusi pemerintah D.I Yogyakarta dalam mempromosikan pariwisata daerah.

---

[12]Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Indonesia*(Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), hlm. 5

[13]*Strategi*, (http://www.kbbi.kata.web.id/Strategi , diakses 21 Juli 2017

Tabel 1.1

Hubungan antara situasi, bentuk, tujuan dan sarana diplomasi kebudayaan

SITUASI	BENTUK	TUJUAN	SARANA
Damai	• Eksebisi • Kompetisi • Pertukaran misi • Negosiasi • Konferensi	• Pengakuan • Hegemoni • Persahabatan • Penyesuaian	• Pariwisata • Olahraga • Pendidikan • Perdagangan • Kesenian
Krisis	• Propaganda • Pertukaran misi • Negosiasi	• Persuasi • Penyesuaian • Pengakuan • Ancaman	• Politik • Diplomatik • Misi Tingkat Tinggi • Opini Publik
Konflik	• Teror • Penetrasi • Pertukaran misi • Boikot • negosiasi	• Ancaman • Subversi • Persuasi • Pengakuan	• Opini Publik • Perdagangan • Para Militer • Forum Resmi • Pihak Ketiga
Perang	• Kompetisi • Teror • Penetrasi • Propaganda • Embargo • Boikot • Blokade	• Dominasi • Hegemoni • Ancaman • Subversi • Pengakuan • Penaklukan	• Militer • Para Militer • Penyelundupan • Opini Publik • Perdagangan • Supply Barang Konsumtif

Sumber: Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. 2007. *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansinya Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, hal 31

Tabel diatas menunjukan bahwa jika dilihat dari perspektif diplomasi kebudayaan maka promosi pariwisata dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu eksebisi dan koferensi.

a. Eksibisi

Diplomasi kebudayaan dengan bentuk paling konvensional adalah eksibisi. Eksibisi sering juga disebut dengan pameran adalah sebuah pertunjukan sebuah hasil dari karya seni, hasil produksi dan sebagainya.[14] Eksibisi ini adalah merupakan bentuk diplomasi budaya yang paling konvensional karena jika dilihat dari gaya diplomasi tersebut menganut dasar-dasar dari eksibisioniktik dan transparan. Eksibisionistik artinya adalah setiap bangsa dianggap mempunyai keinginan bahkan merupakan sebuah keharusan untuk selalu pamer tentang "keunggulan-keunggulan" tertentu yang dimilikinya, sehingga pada giliranya citra bangsa yang bersangkutan dapat memperoleh kehormatan yang lebih tingi. Transparan karena kemajuan teknologi informasi mengakibatkan setiap fenomena yang terjadi dalam suatu negara tertentu dapat saja diketahui oleh negara lain. [15]

Eksibisi atau pameran ini tentunya akan dengan mudah menarik khalayak ramai dikarenakan akan ada berbagai penampilan kesenian yang ikonik dari masing-masing daerah. Eksibisi dapat dilakukan dengan skala lokal maupun internasional. Dalam hal ini Provinsi D.I Yogyakarta mempunyai berbagai

[14]*Pameran*, (http://www.kbbi.kata.web.id/Pameran , diakses 23 Juli 2017)
[15]Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. 2007. *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansinya Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak,2007), hal 21

macam keanekaragaman budaya berupa tarian, pagelaran musik tradisional , permainan tradisional bahkan adat istiadat yang dapat dipertunjukan dalam suatu eksibisi dengan skala internasional. Dengan adanya berbagai pertunjukan kesenian, maka diharapkan dapat mempromosikan pariwisata, meningkatkan hubungan kerjasama dengan daerah lain dan mengangkat nama D.I Yogyakarta dan Indonesia di kancah internasional.

Upaya Provinsi D.I Yogyakarta dalam mempromosikan pariwisata melalui eksibisi antara lain:

a. Pertunjukan Gamelan di Edinburgh Internasional Festival
b. Promosi Pariwisata Yogyakarta ke luar negeri dengan mengikuti *Assosiation Travel Agent Singapore (NATAS) 2013*
c. Promosi Pariwisata Yogyakarta ke Eropa melalui Internationale Tourismus Borse, Berlin, Jerman, 2013
d. Borobudur Internasional Festival

b. Konferensi

Strategi promosi pariwisata D.I Yogyakarta selain dengan eksibisi adalah dengan mengunakan bentuk konferensi. Konferensi berari rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.[16] Dalam pengertian umum konferensi sering diartikan dengan pertemuan resmi dua perwakian atau lebih sebagai media komunikasi dan bertatap muka

[16]*Konferensi*, (http://www.kbbi.kata.web.id/Konferensi , diakses 23 Juli 2017

dengan perwakilan lain yang memungkinkan bahwa dapat dicapainya suatu pemahaman bersama.

D.I Yogyakarta sendiri sudah beberapa kali terlibat dalam konferensi internasional yang terkait dengan Pariwisata, baik itu menjadi peserta maupun menjadi menjadi tuan rumah bagi konferensi internasional tersebut. Konferensi Internasional terkait bidang Pariwisata yang pernah diikuti oleh D.I Yogyakarta yaitu menjadi tuan rumah dari*The Pasific Asia Travel Conference (PATA)* pada 10-12 oktober 2013, konferensi tersebut merupakan sebuah forum untuk menjalin kerjasama antara para pelaku pariwisata sedunia. D.I Yogyakarta juga terlibat dalam *East Asia Inter-Regional Tourism Forum(EATOF)* dan merupakan salah satu dari pemrakarsa berdirinya forum pariwisata berskala internasional tersebut, forum ini berfokus dalam mengintegrasikan hubungan kerja sama dalam bidang pariwisata dari beberapa wilayah di Asia yang terlibat dalam forum tersebut.

D. Hipotesis

Dengan kerangka pemikiran yang ada serta dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka dapat disimpulkan suatu hipotesis sebagai berikut:

Strategi yang diambil oleh pemerintah D.I Yogyakarta terkait mempromosikan pariwisata daerah di kancah internasional tahun 2009-2014 adalah dengan mengunakan paradiplomasi yaitu dengan cara melakukan kerjasama terkait bidang-bidang yang mendukung kemajuan pariwisata D.I Yogyakarta dengan beberapa provinsi lain di dunia. D.I Yogyakarta juga

melakukan upaya lain dengan Diplomasi Kebudayaan melalui eksibisi atau pameran dan Konferensi terkait bidang pariwisata.

E. Tujuan Penulisan

1. Memberi gambaran mengenai kebijakan yang dapat diambil oleh suatu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam memperkenalkan kebudayaan dan pariwisatanya ke luar negeri.
2. Memberi gambaran mengenai strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah daerah dalam melakukan hubungan internasional melalui paradiplomasi dan diplomasi kebudayaan.
3. Menerapkan ilmu dan teori-teori yang didapat oleh penulis selema menempuh perkuliahan dengan suatu fenomena yang ada dalam bentuk tulisan.
4. Untuk memenuhi tugas sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan jenjang strata S-1 pada jurusan ilmu hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penulisan

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan berusaha menggambarkan, mencatat, menganalisa serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sesuai dengan jenis penelitianya maka jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data-data kualitatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* yang dimaksud yaitu dengan mencari bebagai informasi, berita analisis, konsep-konsep hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, karya tulis ilmiah, artikel, internet, media cetak, ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema. Oleh karena itu, metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah metode kontekstual dan kategorial. Metode kontekstual yang dimaksud adalah mencari data-data dan informasi yang sesuai dengan dimensi waktu yang telah ditentukan. Kemudian, data-data tersebut akan dicocokan dengan kategori-kategori yang telah dikelompokan berdasarkan pada definisi-definisi konseptual dalam kerangka teoritis.

G. Jangkauan Penelitian

Supaya pembahasan tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah pada strategi pemerintah D.I Yogyakarta dalam mempromosikan pariwisatanya ke luar negeri 2009-2014. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai banyak potensi wisata. Sedangkan tahun 2009-2014 adalah batasan tahun agar pembahasan tidak terlalu meluas. Beberapa data yang berasal diluar tahun 2009-2014 hanya sebagai data pendukung penelitian.

H. Sistematika penulisan

Bab I berisi garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II bertujuan untuk mengetahui pengertian dari Pariwisata berikut dengan jenis-jenis Pariwisata dan gambaran umum mengenai D.I Yogyakarta sebagai daerah yang mempunyai potensi tinggi dalam bidang pariwisata.

Bab III bertujuan untuk mengetahui bahwa D.I Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata dan berbagai obyek-obyek pariwisata yang ada di D.I Yogyakarta serta mengetahui hambatan-hambatan pariwisata di D.I Yogyakarta.

Bab IVberisi jawaban terhadap rumusan masalah yang ada. Mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta dalam upaya mempromosikan Pariwisata D.I Yogyakarta kepada dunia Internasional. Adapun bab ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan paradiplomasi dan membuat kebijakan strategis pendukung pariwisata antara pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah setingkat provinsi dinegara lain dengan mengunakan konsep paradiplomasi. Bagian kedua ada bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah D.I Yogyakarta dalam menjalankan promosi terkait bidang pariwisata dengan diplomasi kebudayaan dengan melakukan pendekatan eksibisi dan konferensi.

Bab V adalah merupakan bagian kesimpulan dari penulisan skripsi yang telah ditulis oleh penulis